

**ANATOMI KONFLIK SOSIAL WARGA LOKAL
DAN EKS-PENGUNGGSI TIMOR TIMUR**

(Studi Kasus Konflik Sosial di Desa Tanah Merah dan Desa Oebelo
Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang)

Viktor Banao¹, Apolonaris Gai², F.B. Tokan³

Abstrak

Studi ini dilakukan untuk memahami anatomi konflik antara warga lokal di Desa Tanah Merah dan eks Pengungsi Timor Timur di Desa Oebelo yang selalu terjadi terus menerus pada setiap tahunnya. Dengan menggunakan pendekatan konflik, diharapkan dapat menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya dari konflik sosial yang terjadi selama ini antara warga lokal dan eks-pengungsi sejak kehadiran pengungsi di Desa Oebelo. Menggunakan metode deskriptif kualitatif diyakini dapat melacak akar konflik sosial antara warga lokal dan eks pengungsi Timor Timur di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dua hal utama yang menjadi akar konflik warga lokal *versus* eks pengungsi Timor Timur di Kabupaten Kupang, Timor Barat. *pertama*, ketimpangan akses atas tanah yang dapat digunakan sebagai basis produksi dan *Kedua*, adanya pembentukan stereotipe atau *labelling* dan prasangka sosial yang akut antara warga lokal dan eks pengungsi Timor Timur.

Beberapa rekomendasi dapat diajukan penulis mengenai resolusi konflik. *Pertama*, pemerintah harus mengubah arah kebijakan dari yang bersifat *top-down* menuju *bottom-up* serta memberikan hak atas tanah kepada warga eks pengungsi. *Kedua*, pemerintah melalui pihak keamanan harus mengusut tuntas masalah yang melibatkan kedua kelompok dan menindak tegas pihak yang menginisiasi konflik.

Kata kunci: Anatomi konflik, eks pengungsi Timor Timur, warga lokal.

**ANATOMY OF LOCAL SOCIAL CONFLICT
AND EAST TIMOR EX- REFUGEES**

(Case Study of Social Conflict in Tanah Merah Village and Oebelo Village)
Kupang Tengah District, Kupang Regency)

Viktor Banao¹, Apolonaris Gai², F.B. Tokan³

Abstract

This study was conducted to understand the anatomy of the conflict between local residents in Tanah Merah Village and former East Timorese Refugees in Oebelo Village which always occurs continuously every year. By using a conflict approach, it is hoped that it can explain the real problem of the social conflict that has occurred so far between local residents and ex-refugees since the arrival of refugees in Oebelo Village. Using a qualitative descriptive method is believed to be able to trace the roots of social conflict between local residents and former East Timorese refugees in Kupang Regency, East Nusa Tenggara.

The results of the study show that there are two main things that became the root of the conflict between local residents versus former East Timorese refugees in Kupang Regency, West Timor. First, inequality in access to land that can be used as a production base and Second, the formation of stereotypes or labeling and acute social prejudice between local residents and former East Timorese refugees.

Several recommendations can be put forward by the author regarding conflict resolution. First, the government must change the policy direction from top-down to bottom-up and give land rights to ex-refugee residents. Second, the government through the security forces must thoroughly investigate issues involving the two groups and take firm action against those who initiated the conflict.

Keywords: Anatomy of the conflict, former East Timorese refugees, local residents

Kata kunci: Anatomi konflik, eks pengungsi Timor Timur, warga lokal.

¹. Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira

². Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira

³. Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira

PENDAHULUAN

Eksodus warga eks Timor Timur pasca jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 dievakuasi ke beberapa provinsi di Indonesia, sebagian besar pengungsi dievakuasi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni terdapat 250.000 pengungsi, (Soehadha, 2019 :352). Para pengungsi dievakuasi melalui jalur yang berbeda. Perbedaan proses evakuasi berdampak pada perbedaan persebaran tempat tinggal para Pengungsi. Proses evakuasi menggunakan jalur darat yang umumnya tinggal di Kabupaten Belu sementara proses evakuasi menggunakan jalur laut dan udara umumnya tinggal di Kabupaten Kupang, (Dhosa, 2018).

Perbedaan tempat tinggal berdasarkan proses evakuasi ini berdampak pada kehidupan para pengungsi saat ini. Pengungsi yang tinggal di Kabupaten Belu, pada umumnya lebih mudah beradaptasi dengan warga lokal oleh karena adanya kesamaan sejarah, sosiokultural, dan tradisi antara warga Timor Timur dan warga Belu-Malaka. Pengungsi lebih mudah memiliki akses atas tanah baik dipakai untuk membangun rumah maupun dijadikan untuk kebun. Bahkan, pengungsi memiliki hak atas tanah, (Dhosa 2018).

Sementara itu potret kehidupan yang cukup berbeda justru dialami pengungsi yang umumnya tinggal di Kabupaten Kupang. Hingga Juli 2018, masih banyak pengungsi yang tinggal di camp-camp karena sulitnya mendapatkan akses atas tanah. Selain harga tanah di wilayah Kabupaten Kupang yang semakin mahal karena pengembangan kota dan perdagangan. Perbedaan kultural antara warga Eks Timor Timur dengan warga lokal di kabupaten Kupang merupakan salah satu sebab mendasar dari sulitnya mendapatkan akses atas tanah(Dhosa danRatumakin2019).

Setelah sekian lama eks pengungsi Timor Timur tinggal di Timor Barat masih banyak persoalan yang mereka hadapi antara lain ketiadaan akses terhadap pelayanan dasar, perumahan, akses atas tanah, lapangan pekerjaan, konflik sosial dengan masyarakat lokal, dan komodifikasi atas problem eks pengungsi Timor Timur oleh politisi dan aktivis lembaga swadaya, (Soehada 2019 : 365-66).

Di Kecamatan Kupang Tengah konflik-konflik serupa juga terjadi, konflik berdarah yang melibatkan warga Eks Timor Timur *versus* warga lokal di Desa Oebelo dan Desa Tanah Merah masih sering terjadi. Catatan konflik oleh PosKupang.com dapat diperhatikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Konflik yang Melibatkan Warga Eks Timor Timur Desa Oebelo *Versus* Warga Lokal Sejak Tahun 2005 Hingga 2018

No.	Waktu	Korban
1	30 juli 2005	1 orang tewas, 5 rumah terbakar, dan banyak warga mengungsi
2	20 Desember 2009	2 orang warga lokal luka kritis dan belasan lainnya luka-luka
3	28 Februari 2012	Konflik fisik
4	26 Desember 2017	3 orang terluka dan 6 rumah rusak
5	10 Juni 2018	4 orang luka-luka
6	23 Agustus 2018	1 tewas dan 8 luka-luka

Sumber: PosKupang.com, “6 bentrokan melibatkan warga Desa Oebelo-NTT dalam 13 tahun terakhir, ada yang tewas”.

Data pada tabel 1 ini dapat dijelaskan sebagai berikut: konflik *pertama*, pada tanggal 30 Juli 2005: warga Desa Oebelo terlibat konflik dengan warga Desa Tanah Putih, satu orang tewas, lima rumah terbakar dan banyak warga yang mengungsi. *Kedua*, 20 Desember 2009: pengungsi eks Timor Timur yang berdomisili di perumahan Griya Permai Desa Oebelo menyerbu warga lokal di Kampung Putie, sesama Desa Oebelo. Dua orang warga lokal kritis dan belasan lainnya luka-luka. *Ketiga*, 28 Februari 2012: sesama warga baru Desa Oebelo terlibat bentrok fisik saat pertemuan dengan Kepala Desa Oebelo berkaitan dengan pembagian rumah program MBR. *Keempat*, 26 Desember 2017 bentrok antara kelompok pemuda Perumahan Griya Permai Oebelo dengan kelompok Pemuda Desa tanah Merah, tiga orang terluka dan enam rumah warga rusak. *Kelima*, 10 Juni 2018: bentrokan antara warga Desa Oebelo dengan warga Desa Tuapukan, empat orang luka-luka. Dan yang *keenam* atau terakhir, 23-24 Agustus 2018: bentrok antara warga Desa Oebelo dan warga Desa

Tanah Merah, menelan satu orang meninggal duniadan delapan orang lainnya luka-luka.

Konflik antara warga eks Timor Timur dan warga lokal di Kecamatan Kupang Tengah lainnya juga sering terjadi, di Desa Tanah Merah yang terakhir pada tanggal 23-24 Agustus 2018 menyebabkan dua orang tewas dan sepuluh orang luka-luka (Liputan6.com 2018). Namun hingga saat ini konflik yang melibatkan warga eks Timor Timur dengan kelompok lainnya baik dengan warga lokal maupun dengan sesama warga baru di Kecamatan Kupang Tengah belum bisa dipastikan akan berakhir dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi oleh karena pemicu konflik yang nampak di permukaan bervariasi sehingga penyebab mendasar persoalan ini belum diidentifikasi secara jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap akar konflik warga eks pengungsi Timor Timur *versus* warga lokal di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah. Sementara manfaat penelitian ini yakni pada tataran epistemik-teoretik dan pada ranah praksis. *Pertama*, pada bidang epistemik-teoretik, penelitian ini memberikan sumbangan perspektif kritis yang dapat digunakan untuk menjelaskan akar masalah dan strategi kritis penyelesaian masalah sosial antara warga lokal dan pengungsi Timor-Timur. *Kedua*, pada bidang praksis, riset ini dapat memberikan manfaat kepada 3 pihak yakni penulis, pemerintah, masyarakat yang berkonflik. Bagi penulis, riset ini adalah suatu bentuk latihan intelektual dan serentak keterlibatan intelektual penulis menyelami akar mendasar yang menyebabkan berlarut-larut masalah eks pengungsi. Bagi pemerintah, kajian ini menyiapkan data lapangan dan analisis teoretik yang dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan secara tepat bagi warga lokal dan eks pengungsi Timor Timur. Bagi warga lokal dan eks-pengungsi, penelitian ini bertujuan untuk menggali pelbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing aktor untuk kemudian dijadikan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan konflik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengisi kekurangan dan kelemahan pendekatan pemerintah sejak tahun 1999 hingga saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang potret kehidupan dan perjuangan pengungsi Timor Timur atau yang lazim dikenal sebagai ‘warga baru’ telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya. Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas hasil dari beberapa riset terkait, antara lain:

Studi yang dilakukan oleh Damaledo, (2014:159-81) menunjukkan bahwa warga Timor Timur pasca referendum, yang kemudian menetap di Timor Barat mengalami masa pembentukan identitas yang berubah-ubah yakni dari ‘pengungsi’ berubah menjadi ‘eks pengungsi’ dan kemudian ‘warga baru’. Selain itu, (Damaledo 2018:19-34) menegaskan bahwa perjuangan pengungsi Timor Timur sejak masa referendum dan pasca-referendum adalah demi masa depan Timor Timur dan keselamatan orang Timor Timur sendiri.

Setelah eksodus warga eks Timor Timur tahun 1999, eksistensi warga bekas Provinsi Timor Timur di Nusa Tenggara Timur terutama di kabupaten-kabupaten dalam wilayah Timor Barat tetap menjadi persoalan yang tidak pernah tuntas diselesaikan. Akhmadi *et. al.* (2006) menunjukkan bahwa, keberadaan para pengungsi di Desa Noelbaki banyak memberikan dampak negatif bagi warga lokal, khususnya warga atau komunitas yang tinggal di wilayah RW 4 dan RW 5.

Selain itu studi terbaru dilakukan oleh Dhosa dan Ratumakin, (2019). Kedua peneliti ini menemukan bahwa para pengungsi Timor Timur meski telah dua puluhan tahun tinggal di Timor Barat, ternyata sebagian besar dari mereka masih tinggal di camp-camp yang tidak layak huni. Mereka mendiami tanah-tanah pemerintah, tanah suku dan tanah milik pribadi warga Timor Barat.

Dhosa dan Ratumakin, (2019) pun menegaskan bahwa terdapat dinamika kelas diantara para pengungsi. Dinamika kelas yang dimaksudkan di sini adalah relasi terhadap kepemilikan tanah dan dalam aliansi dengan kekuasaan militer. Sebagian kecil pengungsi Timor Timur menguasai areal pertanian dan jejaring pasar.

Kelompok kecil elit ini kemudian mempekerjakan sesama warga khususnya perempuan (ibu-ibu dan anak-anak) Timor Timur di kawasan terminal Noelbaki sebagai pekerja upahan dengan upah yang rendah.

Pada akhirnya, Dhosa dan Ratumakin menegaskan bahwa para pengungsi masih terus berjuang untuk memperoleh pengakuan dari negara dan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk untuk memperoleh tanah sebagai hak milik. Perjuangan ini dilakukan melalui sejumlah negosiasi dan aksi massa demonstrasi di sejumlah lembaga pemerintahan baik di Kabupaten Kupang maupun di Provinsi NTT. Kegagalan negara untuk menerima tuntutan warga baru ini menyebabkan banyak warga Timor Timur menjadi buruh migran.

Usaha untuk perdamaian yang menggunakan upacara adat pernah digelar dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, penduduk lokal, dan pengungsi bahkan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kupang menjadi saksinya. Sejak saat itu, perdamaian tercipta namun ketegangan tetap menyelumuti penduduk lokal sampai saat ini dan masyarakat lokal pada umumnya menyatakan ingin hidup tenteram seperti keadaan sebelum kedatangan pengungsi, masyarakat lokalpun berharap agar pemerintah segera memindahkan pengungsi yang ada dari Desa Noelbaki.

Kelemahan dari beberapa kajian tersebut adalah tidak melacak sebab utama konflik dan tidak mengevaluasi kelemahan paradigma solusi yang ditawarkan oleh pelbagai institusi, dan bahkan tidak pernah menempatkan pengungsi atau warga baru sebagai subyek yang memiliki kekuatan untuk keluar dari problem sosial. Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk mengkaji akar konflik pengungsi, mengevaluasi paradigma penyelesaian konflik, sembari mengidentifikasi potensi dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki baik oleh warga lokal maupun oleh warga baru atau pengungsi dalam menyelesaikan konflik.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik. Konflik merupakan fakta kehidupan atau suatu realita sosial yang sering terjadi dalam

kehidupan manusia, maka kita sebagai manusia tidak bisa menghindari konflik (Aminati dan Purwoko, 2013: 222).

Konflik menurut Saile sebagaimana dikutip Helpita adalah pertentangan atau perbedaan paham antara dua atau lebih kelompok etnis atau daerah. Pertentangan atau perbedaan tersebut berakibat terjadinya tindak kekerasan yang dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda antara kedua pihak atau kelompok yang berkonflik serta korban sarana prasarana pemerintah, (Helpita, 2017:112).

Sedangkan konflik antar kelompok adalah konflik diantara dua kelompok atau lebih terkait pencapaian tujuan masing-masing kelompok yang berbeda (Hanurawan 2014).

Konflik antar kelompok menurut Marx adalah pertentangan antara kelompok proletar melawan kelompok borjuis yang terjadi ketika penindasan yang dilakukan oleh kelompok borjuis terhadap kelompok proletar makin memburuk, pada keadaan demikian kelompok proletariat tinggal memilih dua alternatif saja yakni, mati atau memberontak. Marx meyakini bahwa proletariat tidak akan membiarkan diri mereka mati, mereka akan memberontak, pemberontakan mereka dengan tujuan menyingkirkan kelompok borjuasi dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. pemberontakan itulah yang disebut Marx sebagai revolusi sosialis (Suseno,2001: 168-169).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik antar kelompok yakni pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok yang disebabkan karena perebutan kepentingan yang sama.

Terdapat setidaknya tiga sumber ketidakserasian sosial yang pada saatnya dapat memicu timbulnya konflik sosial yaitu *pertama*, perebutan sumber-sumber daya dan alat-alat produksi serta kesempatan mengakses jaringan ekonomi, *kedua*, perluasan ruang lingkup dan pengaruh kelompok sosial budaya. Perbedaan tradisi, bahasa, hukum dan identitas sosial dapat menyatu dalam kepentingan politik yang dapat memicu konflik, kecemburuan dan berbagai prasangka sosial dalam masyarakat.

Perluasan batas-batas kelompok ini dapat pula muncul dalam bentuk fisik, seperti perluasan pemukiman ke daerah kelompok etnis lain, *ketiga*, gejala stereotype etnik, prasangka (*prejudice*) etnosentrisme, dan perilaku diskriminatif lainnya, baik yang menyangkut agama maupun adat, budaya dan perilaku, bisa menjadi penghambat dalam interaksi serta pergaulan antar suku bangsa dan pada akhirnya muncul dalam bentuk konflik terbuka, (Magnis-Suseno, 2001).

Baik prasangka maupun stereotype sama-sama menempatkan orang lain sebagai pihak yang tidak menjadi bagian dari diri dan karena itu, kelompok itu harus dicurigai sebagai yang asing. Menurut Brigham, (1991) sebagaimana dikutip Damayanti dan Pierewan, (2016:9) stereotype adalah suatu generalisasi yang diterima tanpa pertimbangan dari pengamat. Lanjut Damayanti dan Pierewan, stereotip yang terpelihara dalam waktu lama akan mengakibatkan munculnya prasangka (*prejudice*) dan diskriminasi (*discrimination*).

Sementara prasangka menurut Rosnow, (1972) sebagaimana diikuti dari Damayanti dan Pierewan, (2016: 11) diartikan sebagai sikap tidak masuk akal yang tidak terpengaruh oleh alasan rasional. Aspek rasional dengan sengaja atau tanpa disengaja disingkirkan ketika berhadapan dengan eksistensi orang lain yang berbeda pandangan, berbeda etnik dan agama, serta berlainan ideologi. Pihak lain dianggap sebagai yang asing, yang harus dimusuhi, karena tidak melibatkan akal sehat yang menempatkan pihak lain sebagai martabat yang harus dihormati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif secara khusus menghasilkan kekayaan data yang rinci tentang banyak jumlah orang yang terbatas dan kasus, (Patton, 1991:5). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanah Merah dan Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sejak Maret hingga Juni 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik

Konflik yang melibatkan dua kelompok masyarakat yakni warga eks pengungsi Timor Timur di Desa Oebelo dan warga lokal beretnik Rote terjadi terus menerus sejak kehadiran warga eks pengungsi Timor Timur di Desa Oebelo. Seperti yang dikatakan Bapak Jon Dos Santos bahwa konflik antara warga local Desa Tanah Merah dan warga eks Timor Timur terjadi setiap tahun namun konflik selama ini tidak ditangani oleh pemerintah desa secara baik, karena setiap kali konflik maka aparat keamananlah yang akan menanganinya secara langsung, setelah diamankan kemudian didiamkan saja.

Bapak Ojorio Pires juga mengatakan bahwa konflik antara warga eks Timor Timur dan warga lokal sudah terjadi di mana-mana sejak tahun 2004, dimana konflik sosial bermula dari aksi pelarangan oleh orang rote terhadap warga eks pengungsi Timor Timur untuk tidak sembarang mengambil hasil alam yang ada di sekitar pemukiman, namun konflik itu berakhir hanya dengan adu mulut saja. Setelah itu konflik fisik mulai bermunculan di mana-mana sejak 2004. Selanjutnya konflik sosial terjadi setiap tahun bahkan tidak terhitung jumlahnya. Konflik-konflik yang selama terjadi ini lebih tepat disebabkan oleh akibat dari konflik-konflik sebelumnya yang masih terselubung sebab utamanya yang akan penulis uraikan di bagian berikutnya.

Akar Konflik

Penelitian ini menemukan bahwa akar konflik antara warga lokal dengan pengungsi Timor Timur di Kabupaten Kupang, Timor Barat adalah adanya penguasaan tanah oleh warga lokal dan stereotipe yang dibangun secara membabi-buta di antara kedua kelompok masyarakat ini, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Penguasaan Tanah

Tanah merupakan basis produksi yang menghidupi anggota masyarakat di Timor. Dengan adanya tanah, warga dapat membangun penghidupan yang layak melalui rupa-rupa kegiatan. Warga dapat menanam tanaman pangan dan tanaman

produktif lain yang digunakan untuk menghidupi warga selama periode waktu tertentu.

Ketiadaan hak atas tanah tentu memperparah upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka seperti ditegaskan Borrás *et. al* bahwa ketiadaan tanah sebagai sumber produksi dan ketiadaan akses atas tanah selalu membawa orang untuk dekat dengan kemiskinan. Dalam perkataan lain, ketiadaan tanah menyebabkan kemiskinan akut. Sebaliknya, memiliki akses yang bebas atas tanah justru membuat orang dapat hidup dengan layak. Bahkan, kelebihan atas kepemilikan tanah yang kemudian melahirkan monopoli dan konsentrasi tanah menyebabkan pemusatan kekayaan pada sekelompok elit dan memiskinkan banyak orang, (Dhosa, 2019:169).

Selain tanah sebagai basis produksi, tanah dapat juga dipahami sebagai sumber identitas. Identitas melekat pada tanah. Tanah dipandang sebagai ibu yang membesarkan dan ibu yang merawat. Tanah bagi orang Timor merupakan penanda identitas.

Dengan pertimbangan inilah maka dalam tradisi orang Timor, tanah tidak boleh diperjual-belikan secara leluasa kepada pihak lain. Tanah dapat dipinjamkan kepada pihak lain, tanpa menjadikan tanah sebagai komoditi untuk akumulasi kapital, (Dhosa 2016).

Sejak eksodus warga Timor Timur ke Timor Barat, termasuk ke Kabupaten Kupang pada tahun 1999 hingga 2020, akses atas tanah merupakan problem paling mendasar yang dihadapi baik oleh warga lokal maupun oleh warga Timor Timur. Bagi warga lokal, akses atas tanah semakin sempit karena adanya monopoli penguasaan tanah oleh para pengusaha dan elit politik yang membeli tanah-tanah warga. Warga lokal meminjam uang dari bank yang diperoleh melalui para calo dan agen bank, dengan cara menggadaikan sertifikat tanah.

Hal demikian disampaikan oleh Maklon Daniel Haning bahwa setelah meminjam uang dari para calo atau bank dengan cara menggadaikan sertifikat tanah warga pemilik tanah tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut akhirnya tanah

milik warga disita oleh pihak bank yang menyebabkan kekurangan hak milik atas tanah.

Pada akhirnya hanya ada dua pilihan yang dapat diambil oleh warga yang menggadaikan tanah-tanah mereka. *Pertama*, menjual tanah tersebut kepada pengusaha, untuk kemudian membayar utang di bank; *Kedua*, dengan terpaksa menyerahkan tanah sebagai agunan kepada bank untuk disita. Dua hal inilah yang menyebabkan akses warga lokal atas tanah produktif dan tanah potensial di pinggir jalan dipersempit.

Selain warga lokal, akses yang sempit atas tanah dialami juga oleh warga Timor Timur di Timor Barat. Warga Timor Timur mengakui bahwa mereka tidak bisa mengolah tanah secara bebas dan leluasa. Kendala utama yang mereka hadapi adalah mereka tidak berhak atas tanah tersebut. Hak atas tanah secara legal dibuktikan oleh sertifikat tanah. Warga Timor Timur justru tidak memiliki sertifikat tanah sebagai bukti legal yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mengelola tanah.

Tanah yang dimiliki oleh warga eks pengungsi Timor Timur sangat sedikit ukurannya bagi warga yang pekerjaannya sebagai petani, ukuran tanah yang minim ini disampaikan oleh Bapak Ojorio bahwa tanah milik warga eks pengungsi Timor Timur belum memiliki status yang jelas, kecuali tanah yang menjadi halaman rumah mereka karena sudah ada sertifikat yang jelas, sementara lahan yang dijadikan sawah belum memiliki status kepemilikan yang jelas, karena belum ada sertifikat atas tanah-tanah tersebut.

Senada dengan apa yang disampaikan bapak Ojorio, Duarte Fernandes selaku ketua pemuda eks pengungsi Timor Timur menyampaikan bahwatanah yang sementara menjadi hunian warga eks pengungsi Timor Timur sudah memiliki status yang sah dan semuanya memiliki sertifikat hak atas tanah, sementara sawah yang mereka kerjakan dan merupakan milik warga lokal maka diadakan bagi hasil panen, karena kebanyakan warga eks pengungsi Timor Timur bekerja sebagai petani.

Dapat disimpulkan bahwa tanah yang dimiliki warga eks pengungsi Timor Timor di Desa Oebelo sangat minim, kondisi seperti ini menyulitkan mereka untuk bertahan hidup, yang lebih parah lagi mata pencaharian mereka kebanyakan sebagai petani.

Dalam praksisnya, tiap kali panen hasil, orang lokal mendatangi pengungsi untuk menagih jatahnya. Hal ini berlaku sejak tahun 2005 hingga 2013. Akan tetapi, pada saat pemerintah Kabupaten Kupang memberikan informasi lewat sosialisasi kepada warga bahwa tanah yang dihuni dan digarap oleh warga Timor Timur adalah tanah negara, dan warga pengungsi mulai sadar akan kebenaran informasi tersebut, maka sejak itulah mereka tidak membagi hasil panen kepada warga lokal.

Menolak bagi hasil dengan warga lokal dengan carameminta bukti hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah membuat warga lokal tidak berdaya untuk menuntut bagi hasil lagi kepada warga eks pengungsi Timor Timor. Dititik inilah konflik horizontal antara warga lokal dan pengungsi Timor Timur meletup.

Jauh sebelum kedatangan warga Timor Timur, warga lokal mengolah tanah secara bebas dan leluasa. Lahan garapan sangat luas untuk diolah. Akan tetapi, sejak kedatangan pengungsi di Kabupaten Kupang yang kemudian membutuhkan tanah, akses warga lokal atas tanah semakin dipersempit baik oleh bank-bank dan pengusaha yang telah mengakuisisi tanah maupun oleh kehadiran warga Timor Timur.

Hal tersebut diatas diperkuat dalam observasi peneliti yang melihat kondisi keterdesakan akses atas tanah yang membenturkan kedua kelompok masyarakat. Warga lokal terdesak oleh akses yang semakin sempit atas tanah, sementara itu, warga pengungsi Timor Timur pun terdesak oleh ketiadaan akses yang legal atas tanah untuk membangun rumah dan untuk mengolah tanah pertanian. Situasi keterdesakan seperti ini turut menyulut konflik yang akut antara kedua kelompok masyarakat.

Eskalasi konflik antara kedua kelompok ini semakin berkurang sejak Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat tanah secara langsung kepada pengungsi Timor Timur pada Agustus 2019. (Jahang, 2019).

Dengan sertifikat tanah ini, warga pengungsi mulai merasa lebih tenang untuk membangun hunian. Kehadiran sertifikat tanah ini cukup signifikan menurunkan tingkat konflik antara warga lokal dan warga Timor Timur. Meski diakui bahwa pemberian sertifikat tanah bukanlah satu-satunya cara untuk menghentikan konflik. Sebab, tanah yang bersertifikat tersebut berukuran kecil, yang digunakan untuk membangun rumah, dan bukan tanah luas yang dipakai untuk mengolah pertanian. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pemberian sertifikat tanah kepada warga Timor Timur adalah model penyelesaian konflik berjangka pendek, yang mesti diikuti oleh model pendekatan lain yang lebih komprehensif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiadaan akses atas tanah oleh warga Timor Timur dan keterdesakan akses atas tanah oleh warga lokal sebagaimana dipaparkan di depan adalah sebab paling mendasar konflik antara kedua kelompok ini.

Stereotype (*labelling*) dan Prasangka

Selain oleh akses yang timpang atas tanah, akar konflik kedua kelompok ini disebabkan oleh adanya stereotype atau *labelling* dan prasangka (*prejudice*) yang akut. Sebagaimana telah dikemukakan di depan, baik stereotype maupun prasangka, sama-sama menempatkan orang lain bukan bagian dari diri, dan karena itu, ia menjadikan pihak lain sebagai yang asing. Yang asing bukan dipandang sebagai apa yang Emanuel Levinas, filosof Yahudi sebut sebagai '*the other*', '*liyan*' yang hadir melalui wajah yang menuntut tanggungjawab kita. Sebaliknya, yang asing dalam perspektif stereotype dan prasangka adalah pihak lain yang dibenci dan diperlakukan secara tidak adil atau diskriminasi.

Relasi sosial antara warga lokal dan pengungsi Timor Timur diwarnai baik oleh stereotype maupun oleh prasangka sosial yang meletup-letup. Keterbatasan

pengetahuan dan kekurangan informasi tentang pihak lain memperkeruh konflik horizontal. Berikut ini akan dipaparkan temuan-temuan penelitian lapangan yang berkaitan dengan stereotipe dan prasangka. Pada prinsipnya, kedua kelompok ini sama-sama terlibat secara intens untuk membangun *labelling* dan prasangka. Warga lokal membangun citra tersendiri terhadap warga Timor Timur, demikian pula warga Timor Timur membentuk citra lain terhadap warga lokal sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

Warga Lokal Etnik Rote

Warga lokal dari etnik Rote yang menjadi subyek penelitian ini memiliki pandangan yang unik tentang pengungsi Timor Timur. Ibu Viktoria Pandie, seorang ibu dari warga Desa Tanah Merah, Kabupaten Kupang menegaskan warga eks pengungsi Timor Timur memiliki sifat yang tidak baik, contohnya jika ada tanaman seperti buah papaya, ubi dan lain sebagainya yang bukan merupakan milik mereka sekalipun mereka langsung mengambilnya tanpa seizing pemiliknya.

Pernyataan Viktoria Pandie di atas menyingkapkan suatu cara pandang negatif terhadap pengungsi Timor Timur. Di mata Viktoria Pandie, para pengungsi mengambil barang-barang milik orang lokal khususnya bahan makanan sesuka-hati, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik. Sikap seperti inilah yang membuat para pengungsi dipersepsi oleh Viktoria Pandie sebagai orang yang memiliki sifat buruk dalam relasi dengan orang lain.

Senada dengan Ibu Viktoria Pandie, Bapak Paulus Seproni Besi yang adalah ketua Rukun Warga (RW) sekaligus tokoh masyarakat Desa Tanah Merah menegaskan bahwa kehadiran warga Timor Timur pasca-jajak pendapat 1999 menyebabkan ketidak-amanan bagi warga lokal. Warga lokal merasa tidak nyaman dengan kehadiran warga eks pengungsi Timor Timur, Bapak Paulus Seproni Besi melabeli pengungsi eks Timor Timur sebagai orang yang mengganggu dan suka mencari masalah dengan warga lokal.

Dari temuan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara pemuda warga lokal Desa Tanah Merah dengan pemuda pengungsi tampak tidak aman. Ketidakjelasan hubungan mereka disebabkan konflik yang sering terjadi ini tidak pernah diselesaikan hingga tuntas. Eks pengungsi dianggap manusia liar yang bodoh, dan tidak berpendidikan. Akibat keterbatasan pendidikan ini membawa eks pengungsi terlibat dalam perkelahian yang berantai dan kemudian mencuribarang milik warga lokal.

Meski stereotipe dan prasangka intens yang dibangun oleh warga lokal tampak masif, hal ini tidak membuat warga Timor Timur membisu. Mereka pun membangun wacana tandingan, *counter*-stereotipe dan prasangka balik terhadap warga lokal. Kekuasaan yang menindas selalu berhadapan dengan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Mayoritas masyarakat yang menguasai kanal-kanal sumber daya, akan selalu menghadapi tuntutan resistensi dari kelompok minoritas. Dengan demikian, paradigma kekuasaan dan dominasi akan selalu berhadapan dengan resistensi baru. Hal ini berlaku pula dalam relasi sosial antar kelompok masyarakat

Warga Timor Timur atau eks pengungsi Timor Timur

Berhadapan dengan peliknya situasi yang dihadapi pasca jajak pendapat 1999, warga Timor Timur membangun stereotipe dan prasangka terhadap warga lokal di Desa Tanah Merah.

Pelabelan terhadap warga Timor sebagai pengungsi oleh warga lokal tidak bisa diterima dengan baik oleh warga Timor Timur. Damaleldo, (2014) menulis bahwa warga Timor Timur menerima pelabelan yang bermula dari ‘pengungsi’, bergeser menjadi ‘eks pengungsi’ dan berlanjut dengan sebutan ‘warga baru’.

Temuan Damaledo tersebut masih berlangsung hingga saat ini pada saat penelitian lapangan berlangsung pada bulan Maret 2020. Jovianus Fernandes, pemuda Oebelo asal Timor Timur, yang bekerja sebagai ojek dan sesama warga Timor Timur tidak menerima jika mereka disebut dan dianggap sebagai pengungsi dan eks

pengungsi. Sebutan ini atau pelabelan seperti ini sangat mengganggu kehidupan harian mereka.

Lebih lanjut Jovianus mengatakan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah tinggal di Provinsi Timor Timur. Mereka beranggapan bahwa mereka tetap menjadi bagian dari Indonesia. Mereka memilih Indonesia, berkurban segala-galanya demi ibu pertiwi Indonesia. Atas dasar inilah, pelabelan pengungsi atas diri mereka tidak bisa diterima secara baik.

Ketidaksukaan satu pihak terhadap pihak lain diperparah oleh adanya cara pandang negatif dimana pihak yang satu mengatakan pihak lain sebagai orang bodoh. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu label yang diberikan warga lokal terhadap warga Timor Timur sebagaimana ditegaskan Ojorio Pires adalah '*Timor Bou*' Istilah ini berarti 'Timor Bodoh.

Timor bodoh adalah suatu bentuk pelabelan terhadap orang Timor Timur. Seperti ditegaskan Bapak Ojorio Pires bahwa konflik selama ini sering dipicu oleh ejekan yang dilontarkan oleh warga lokal beretnik Rote kepada warga eks pengungsi Timor Timur. Anggapan orang Rote bahwa orang Timor Timur itu bodoh tidak diterima dengan baik oleh warga pengungsi Timor Timur. Awalnya warga eks pengungsi Timor Timur tidak memahami ejekan dalam bahasa daerah yang bunyinya '*Timor Bou*' namun setelah mereka ketahu maka kedua kelompok ini saling menanggapi dan akhirnya timbullah konflik.

Pelabelan seperti ini menciptakan kemarahan lebih lanjut dan menggoreskan ketidaksukaan di dalam salah satu pihak yang berkonflik. Hal inilah yang memperparah relasi sosial antara warga lokal di Desa Tanah Merah dengan warga Timor Timur yang tinggal di Oebelo. Pihak yang satu menganggap rendah pihak lain, sementara itu pihak yang lain tidak menerima begitu saja anggapan stereotipe yang disematkan kepada mereka. Inilah momen konflik yang jika tidak diselesaikan secara tuntas akan melanggengkan konflik horizontal.

PENUTUP

Kehadiran warga Timor Timur pasca jajak pendapat pada tahun 1999 ke Timor Barat menyisahkan problematika yang seakan sulit diselesaikan oleh banyak pihak. Kegagalan ini disebabkan paling mendasar oleh pengabaian akar utama dari konflik.

Studi ini menemukan dua faktor mendasar adanya konflik antara warga lokal di Desa Tanah Merah dengan eks pengungsi Timor Timur di Desa Oebelo di Kabupaten Kupang. Kedua hal dimaksud adalah *pertama*, ketimpangan akses atas tanah yang dapat digunakan sebagai basis produksi. Akses atas tanah yang timpang dialami bukan hanya oleh warga Timor Timur pasca eksodus ke Timor Barat, melainkan juga dialami oleh warga lokal. Warga lokal menggadaikan tanah kepada sejumlah bank. Pada saat mengalami kebuntuan membayar utang, tanah yang dijadikan agunan pinjaman diambil oleh bank. Bahkan, pada saat mengalami kesulitan ekonomi, warga lokal menjual tanah kepada pengusaha. Hal ini kemudian memunculkan penguasaan tanah oleh elit ekonomi etnis China di Desa Tanah Merah hingga Oebelo. Kondisi ini pula yang menyebabkan keterdesakan dalam bidang ekonomi bagi warga lokal.

Pada saat keterdesakan ini tidak diatasi secara serius, warga Timor Timur bereksodus ke Timor Barat, yang justru menambah rumit akses atas tanah. Warga Timor Timur mengolah tanah di Desa Oebelo dan Tanah Merah. Pada akhir musim panen, warga lokal mengambil haknya berupa pembagian hasil panen.

Tapi, pada saat warga Timor Timur mengetahui bahwa tanah yang mereka garap selama ini adalah HGU, maka mereka kemudian tidak memberikan sebagian hasil panen terhadap warga lokal. Hal ini menjadi pemicu konflik dan kecemburuan sosial di antara kedua pihak. Secara teoretik, ketiadaan akses atas tanah membawa orang kepada kemiskinan sistemik. Dan, hal ini justru sedang dialami oleh warga Timor Timur dan juga warga lokal.

Kedua, adanya pembentukan stereotipe atau *labelling* dan prasangka sosial yang akut. Kemiskinan yang dialami oleh kedua kelompok sosial ini semakin diperburuk dengan *labelling* dan prasangka sosial. Warga lokal menghidupi stereotipe dan prasangka sosial terhadap warga Timor Timur. Sebaliknya, warga Timor Timur

menaruh rasa curiga dan prasangka buruk pula terhadap warga lokal. Ketidakpercayaan antara dua pihak ini menyebabkan konflik sosial tidak pernah diselesaikan hingga saat ini.

Dari hasil analisa dan penelitian penulis mengajukan beberapa saran penting mengenai resolusi konflik. *Pertama*, pemerintah harus mengubah arah kebijakan dari yang bersifat *top-down* menuju *bottom-up* serta memberikan hak atas tanah kepada warga eks pengungsi. *Kedua*, pemerintah melalui pihak keamanan harus mengusut tuntas masalah yang melibatkan kedua kelompok dan menindak tegas pihak yang menginisiasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi *et. al.* 2006. *Studi Keluar dari Kemiskinan: Kasus di Komunitas RW 4, Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: lembaga penelitian SMERU.
- Aminati, Arfiani Yulia dan Purwoko, Budi. 2013. “*Studi kepustakaan landasan teori dan praktik konseling resolusi konflik interpersonal*”. Jurnal BK UNESA, Vol. 03, No. 01.
- Damaledo, Andrey. 2014. ‘*We are not new citizens; we are East Timorese*’: *displacement and labelling in west Timor. Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 48, No. 1, pp. 159-81.

- , 2018. "To Separate is to Sustain: Sacrifice and national belonging among East Timorese in West Timor". *The Australian Journal of Anthropology*, 29, 19-34.
- Damayanti, Melvia dan Pierewan, Adi Cilik. 2016. "Prasangka sosial terhadap Salafi di Yogyakarta". *Jurnal pendidikan sosiologi UNY*.
- Dhosa, Didimus Dedi dan Ratumakin, Paulus A.K.L.2919. "Ekonomi Politik Redistribusi Tanah, Dinamika Kelas dan Perjuangan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat, Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 11, Nomor 1.
- Dhosa, Didimus Dedi. 2018. "Pendidikan Kritis dan Aksi Massa Pengungsi Timor Timur di Timor Barat". Ukrida: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3 No. 1, 581-588.
- _____. 2016. "Ekonomi Politik dan Pembangunan Pengungsi Timor Timur di Timor Barat". [Opini], Pos Kupang, 3 Desember 2016.
- _____. 2019. *Land Acquisition, peasant Exlucion and People Resistence Advocacy at Bolok Industrial Area in Kupang, East Nusa Tenggara Timur, Indonesia*. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 7 No. 3, 2019.
- Hanurawan, F. *Psikologi Kelompok*. Serang: FTK Banten Press, 2014.
- Helpita, Neza. 2017. "Resolusi konflik antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci". *JESS*, Vol. 1 No. 1.
- Jahang, Benediktus Sridin Sulu. Presiden Jokowi Menyerahkan 2.709 Sertifikat Tanah di NTT, ANTARANEWS.COM. diakses 21 Agustus 2019.
- Keda, Amar Ola. Kronologi Bentrok Berdarah Warga di Kupang Tengah. *Liputan6.com*. diakses pada 27 Agustus 2018. 23:00.
- Patton, Michael Quin. 1991. Penerjemah Budi Puspo Priyadi (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soehadha, Moh. 2019. "Penguatan Identitas dan Segregasi Sosial Komunitas Eks Pengungsi Timor Timur". *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 No. 2.

Pos Kupang.com. 2018. “6 bentrokan melibatkan warga Desa Oebelo-NTT dalam 13 tahun terakhir, ada yang tewas”. Diakses pada Kamis, 23 Agustus 2018.